

Judul : Kerawanan Netralitas Terbanyak pada Pilkada
Tanggal : Jumat, 22 September 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Kerawanan Netralitas Terbanyak pada Pilkada

Bawaslu RI meminta jajarannya mencermati isu dimajukannya pelaksanaan Pilkada 2024.

TRI SUBARKAH
subarkah@mediaindonesia.com

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI resmi meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan umum serentak 2024 di Manado, Sulawesi Utara, kemarin. Netralitas aparat sipil negara (ASN) menjadi isu strategis dalam pemetaan tersebut.

Peluncuran itu dilakukan setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait dengan rencana percepatan pelaksanaan Pilkada 2024, Rabu (20/9) malam.

Mendagri kembali mengungkapkan usul pelaksanaan pilkada dipindah ke September 2024 dari yang semula dijadwalkan pada November.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, berdasarkan pemetaan, kerawanan netralitas ASN paling banyak terjadi saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu membuat Bawaslu RI meminta jajarannya mencermati isu dimajukannya pelaksanaan Pilkada 2024.

Menurut Lolly, Bawaslu dapat memahami upaya percepatan jadwal Pilkada 2024. Namun, percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 tetap menimbulkan kerawanan bagi Bawaslu, termasuk soal netralitas ASN.

"Apa implikasinya, ada enggak? Tentu akan ada. Bagi Ba-

Model penghitungan dua panel mulanya menjadi inovasi dari KPU untuk meminimalkan beban dan risiko kerja KPPS di tempat pemungutan suara (TPS).

waslu, seluruh hal itu rawan, termasuk ketika pilkada dimajukan. Tingkat netralitas ASN menjadi kewaspadaan Bawaslu," kata Lolly.

Ketidaknetralan ASN, yakni mempromosikan calon tertentu, menyatakan dukungan secara terbuka di media sosial, hingga menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon petahana. Kemudian, teridentifikasi memberikan dukungan pada grup perpesanan atau media sosial, serta terlibat secara aktif ataupun pasif dalam kampanye calon.

Motif ASN yang tidak netral ialah untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Selain itu, ada alasan hubungan primordial, tidak paham pada regulasi netralitas ASN, dan tekanan sanksi.

"Pejabat struktural yang pu-

nya kuasa, tidak tersentuh dan lebih banyak menjadi perantara. Korbannya ialah para staf yang dalam posisi ini mereka menjadi serbasalah," terang Lolly.

Hasil pemetaan Bawaslu menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN dengan skor 100, disusul Sulawesi Utara (55,87), dan Banten (22,98).

Dua panel batal

Dalam kaitan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI batal mengimplementasikan model penghitungan dua panel pada Pemilu 2024. Model itu sedianya untuk mengurangi beban kerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Enggak (diterapkan untuk Pemilu 2024), proses penghitungan suaranya sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019, dilakukan satu tim anggota KPPS tujuh orang itu," kata Hasyim usai rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI, Rabu (20/9) malam.

Hasyim mengatakan pihaknya akan menyaliasi beratnya beban kerja petugas KPPS saat penghitungan surat suara. Salah satunya mempercepat proses seleksi anggota KPPS dari segi umur dan kondisi kesehatan.

Model penghitungan dua panel mulanya menjadi inovasi dari KPU untuk meminimalkan beban dan risiko kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS). Dengan model tersebut, penghitungan surat suara yang terdiri dari lima ragam dinilai bakal cepet selesai. (P-2)